

DILEMA DISIPLIN GURU DI ERA HAK ASASI MANUSIA: ANTARA KODE ETIK DAN TANTANGAN PERILAKU SISWA DI SMP 1 ULUJAMI

Sikha Nur Inayah¹, Windi Nurrohmatul Azizah², Himatunnisa³, Nur Khasanah⁴
^{1,2,3,4} Pendidikan Agama Islam, Tarbiyah dan Ilmu Keguruan,
Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
nayasikha@gmail.com, windi,nurrohmatul.azizah@mhs.uingusdur.ac.id,
himatun.nisa@mhs.uingusdur.ac.id, nur.khasanah@uigusdur.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze teachers' dilemmas in enforcing discipline in the era of human rights, the implementation of the teacher code of ethics, and humanistic disciplinary enforcement strategies at SMP 1 Ulujami. The study used a qualitative approach with descriptive research and case studies. Data were obtained through observation and documentation studies, then analyzed using qualitative descriptive analysis techniques. The results indicate that teachers face a dilemma in enforcing discipline because they must balance assertiveness with respect for students' rights. Challenges in student behavior influenced by technological and social media developments also affect teachers' authority in the learning process. In practice, the implementation of the teacher code of ethics is carried out through a fair, educational, and character-building approach. This study also found that humanistic disciplinary strategies, such as a dialogical approach, providing educational consequences, teacher role models, and collaboration with parents, can create a more conducive learning environment and support positive student character development.

Keywords: *humanistic discipline, teacher code of ethics, human rights, student behavior, teacher authority.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dilema guru dalam menegakkan disiplin di era hak asasi manusia, implementasi kode etik guru, serta strategi penegakan disiplin secara humanis di SMP 1 Ulujami. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan studi kasus. Data diperoleh melalui observasi dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru mengalami dilema dalam menegakkan disiplin karena harus menyeimbangkan ketegasan dengan penghormatan terhadap hak peserta didik. Tantangan perilaku siswa yang dipengaruhi perkembangan teknologi dan media sosial turut memengaruhi otoritas guru dalam proses pembelajaran. Dalam praktiknya, implementasi kode etik guru dilakukan melalui pendekatan yang adil, edukatif, dan berorientasi pada pembinaan karakter. Penelitian ini juga menemukan bahwa strategi disiplin secara humanis, seperti pendekatan dialogis, pemberian konsekuensi edukatif, keteladanan guru, serta kerja sama dengan orang tua, mampu menciptakan suasana pembelajaran yang lebih kondusif dan mendukung pembentukan karakter peserta didik secara positif.

Kata Kunci: disiplin humanis, kode etik guru, hak asasi manusia, perilaku peserta didik, otoritas guru.

A. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan proses fundamental dalam membentuk karakter, moral, dan kepribadian peserta didik. Dalam pelaksanaannya, guru memiliki peran strategis tidak hanya sebagai penyampai ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai pembimbing, teladan, dan penanam nilai-nilai etika. Oleh karena itu, profesi keguruan tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab moral dan profesional dalam menjaga kedisiplinan serta membentuk sikap dan perilaku peserta didik sesuai dengan norma yang berlaku (Nurfaijan, Haifaturrahmah 2025).

Pada masa lalu, praktik pendidikan di sekolah cenderung menempatkan guru sebagai figur otoritas utama dalam proses pembelajaran. Guru dipandang sebagai sumber pengetahuan sekaligus pihak yang memiliki kewenangan besar dalam mengatur jalannya pembelajaran dan menegakkan disiplin. Dalam konteks tersebut, peserta didik umumnya menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap aturan sekolah maupun terhadap arahan guru.

Sikap hormat, segan, dan tunduk menjadi ciri yang melekat dalam interaksi antara peserta didik dan guru. Budaya sosial yang menjunjung tinggi penghormatan kepada orang yang lebih tua dan memiliki otoritas turut memperkuat posisi guru dalam lingkungan pendidikan. Namun demikian, pola hubungan yang bersifat otoritatif tersebut juga cenderung membatasi ruang dialog dan kebebasan berekspresi peserta didik.

Seiring dengan perkembangan zaman, terjadi perubahan paradigma dalam dunia pendidikan menuju pendekatan yang lebih demokratis dan humanis. Peserta didik tidak lagi dipandang sebagai objek, melainkan sebagai subjek yang aktif dalam proses pembelajaran serta memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan berekspresi. Perkembangan pemikiran tentang hak asasi manusia (HAM) dan perlindungan anak semakin memperkuat posisi peserta didik dalam sistem pendidikan. Interaksi antara guru dan peserta didik pun menjadi lebih terbuka dan komunikatif.

Namun demikian, perubahan tersebut juga membawa konsekuensi dalam praktik di lapangan. Dalam beberapa kasus, kebebasan berekspresi yang dimiliki peserta didik tidak selalu diiringi dengan pemahaman yang memadai mengenai etika dan batasan dalam berinteraksi dengan guru. Hal ini terlihat dari munculnya perilaku yang kurang mencerminkan sikap hormat, seperti membantah secara tidak santun, mengabaikan instruksi, serta menunjukkan sikap yang kurang sopan dalam proses pembelajaran.

Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan media sosial turut mempengaruhi pola interaksi antara peserta didik dan guru. Pada era digital saat ini, terdapat fenomena di mana guru dijadikan bahan candaan dalam bentuk meme, komentar negatif, atau simbolisasi yang kurang pantas di berbagai platform digital. Dalam beberapa kasus, hal tersebut berkembang menjadi bentuk komunikasi yang tidak mencerminkan etika, seperti penggunaan kata-kata yang tidak sopan atau pemberian label negatif terhadap guru. Fenomena ini

menunjukkan adanya pergeseran dalam cara peserta didik memandang figur guru, yang berpotensi mengurangi penghormatan terhadap profesi keguruan.

Di sisi lain, guru dihadapkan pada tuntutan untuk tetap menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia serta mematuhi berbagai regulasi yang melindungi peserta didik. Kondisi ini menempatkan guru pada situasi yang dilematis dalam menegakkan disiplin. Guru dituntut untuk bersikap tegas dalam menjaga ketertiban dan proses pembelajaran, namun di saat yang sama harus berhati-hati agar tidak melakukan tindakan yang dianggap melanggar hak peserta didik atau ketentuan hukum yang berlaku. Kekhawatiran terhadap konsekuensi hukum seringkali membuat guru menjadi ragu dalam mengambil tindakan disipliner (Simamora et al. 2025).

Dalam konteks profesional, guru sebenarnya telah memiliki pedoman dalam bertindak melalui kode etik profesi keguruan. Kode etik tersebut mengatur bagaimana guru bersikap, termasuk dalam menegakkan disiplin secara adil,

bijaksana, dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan (Addysa et al. 2024). Namun, dalam prakteknya, penerapan kode etik tidak selalu berjalan secara ideal. Guru seringkali dihadapkan pada situasi yang kompleks, di mana tindakan yang secara pedagogis dianggap tepat justru berpotensi dipersalahkan secara hukum atau sosial. Hal ini menimbulkan ketegangan antara tuntutan profesionalisme, penerapan kode etik, dan realitas perilaku peserta didik di lapangan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penegakan disiplin di sekolah pada era saat ini tidak hanya menjadi persoalan teknis, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek etika profesi keguruan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam mengenai dilema yang dihadapi guru dalam menegakkan disiplin di tengah tuntutan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan penerapan kode etik profesi, serta tantangan perilaku peserta didik dalam lingkungan pendidikan

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam fenomena dilema guru dalam menegakkan disiplin di era hak asasi manusia, khususnya dalam penerapan strategi disiplin secara humanis. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif dan kontekstual terhadap realitas yang terjadi di lingkungan pendidikan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, dengan lokasi penelitian di SMP 1 Ulujami. Pemilihan studi kasus didasarkan pada fokus penelitian yang mengkaji fenomena secara mendalam dalam konteks tertentu, sehingga diharapkan mampu menggambarkan praktik penegakan disiplin secara rinci dan sistematis.

Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung terhadap aktivitas dan interaksi guru dalam menegakkan disiplin. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu

dengan menelaah buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan sebagai landasan teoritis.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan studi dokumentasi. Observasi digunakan untuk memperoleh data empiris di lapangan, sedangkan studi dokumentasi digunakan untuk mendukung analisis melalui sumber tertulis yang relevan.

Teknik analisis data mengacu pada model analisis interaktif dari Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña (2014), yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis ini didukung oleh kerangka metodologis dari John W. Creswell (2023) yang menekankan pendekatan interpretatif. Untuk menjaga keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan hasil observasi dan kajian literatur.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Dilema Guru dalam Menegakkan Disiplin dan Tantangan Perilaku Siswa dalam Proses Pembelajaran

Menurut pendapat Ernawati (2016) yang dikutip oleh (Samuel Mamonto, Darto Wahidin, Itsna Noor Laila, Achmad Tavip Junaedi, M Sahrawi Saimima, Nur Syafi'ah Khotim, Jihad Achmad Gojali, Sudarno, Nicholas Renaldo, and Diterbitkan 2023), disiplin merupakan rangkaian proses panjang melalui penciptaan dan pembentukan yang menunjukkan nilai taat, patuh, setia, teratur, hingga tertib. Dalam konteks pendidikan, disiplin merupakan salah satu unsur penting yang tidak hanya dimaknai sebagai kepatuhan terhadap aturan sekolah, tetapi juga sebagai upaya pembinaan kesadaran peserta didik untuk bertindak sesuai dengan norma, etika, dan tata tertib yang berlaku (Ahmad Zaki Ilman Nasution, Firman Firman 2025). Melalui penerapan disiplin, peserta didik diharapkan mampu mengembangkan sikap

tanggung jawab, ketepatan waktu, kepatuhan terhadap aturan, serta kesungguhan dalam mengikuti proses pembelajaran. Oleh karena itu, disiplin menjadi bagian yang sangat penting dalam pembentukan karakter peserta didik.

Dalam proses pembelajaran, guru memiliki peran strategis sebagai pendidik yang tidak hanya bertugas menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga membimbing peserta didik dalam membangun perilaku yang baik. Penegakan disiplin menjadi salah satu bentuk tanggung jawab profesional guru dalam menjaga keteraturan proses belajar mengajar (Setianingsih 2024). Penerapan disiplin yang dilakukan secara konsisten dapat membantu menciptakan suasana belajar yang tertib, kondusif, dan efektif sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Namun, dalam prakteknya penegakan disiplin di lingkungan sekolah tidak selalu berjalan dengan mudah. Guru dihadapkan pada berbagai tantangan perilaku

siswa yang dapat mengganggu jalannya proses pembelajaran. Hasil penelitian di SMP 1 Ulujami menunjukkan bahwa guru menghadapi dilema yang cukup kompleks dalam menegakkan disiplin peserta didik. Dilema tersebut muncul ketika guru harus mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan siswa, tetapi di sisi lain terdapat kekhawatiran bahwa tindakan tersebut dapat disalah artikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak peserta didik.

Kekhawatiran guru dalam menegakkan disiplin semakin menguat dengan maraknya pemberitaan di media sosial mengenai kasus-kasus guru yang berhadapan dengan proses hukum akibat tindakan pendisiplinan terhadap siswa. Salah satu contoh yang cukup menyita perhatian publik adalah kasus guru honorer Tri Wulansari di Muaro Jambi yang menjadi tersangka karena tindakan yang dimaksudkan untuk mendisiplinkan siswa (Salam 2026). Fenomena semacam ini

menimbulkan keresahan di kalangan guru sehingga sebagian dari mereka merasa berada pada posisi yang serba sulit, yaitu antara mempertahankan ketegasan demi menjaga ketertiban pembelajaran atau menghindari potensi kesalahpahaman dari siswa maupun orang tua.

Kondisi tersebut semakin diperkuat oleh berbagai tantangan perilaku siswa yang ditemukan di lingkungan SMP 1 Ulujami. Berdasarkan hasil observasi, ditemukan beberapa bentuk pelanggaran disiplin yang cukup sering terjadi, seperti keterlambatan masuk kelas, membolos pembelajaran, bermain telepon genggam saat pembelajaran berlangsung, tidur di kelas, mencontek saat ujian, kurangnya perhatian terhadap penjelasan guru, tidak mengerjakan tugas, perilaku mengejek guru, candaan yang tidak pantas kepada guru, hingga kecenderungan membantah teguran yang diberikan. Berbagai perilaku tersebut menunjukkan adanya perubahan pola interaksi

antara peserta didik dan guru dibandingkan dengan kondisi pada masa sebelumnya.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian peserta didik di SMP 1 Ulujami memiliki keberanian yang lebih besar dalam menyampaikan pendapat, bertanya, maupun mengekspresikan apa yang mereka pikirkan. Perkembangan ini pada dasarnya merupakan hal yang positif karena menunjukkan bahwa proses pembelajaran tidak lagi berlangsung secara sepihak seperti pada pola pendidikan tradisional. Peserta didik mulai terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran, sehingga tercipta suasana kelas yang lebih partisipatif.

Namun demikian, tidak semua peserta didik memahami batas antara kebebasan berpendapat dan etika dalam berkomunikasi. Masih ditemukan peserta didik yang menyela penjelasan guru, memberikan tanggapan dengan cara yang kurang sopan, bahkan menganggap hubungan dengan guru seperti hubungan dengan

teman sebaya. Fenomena ini menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi yang berkembang dalam paradigma pendidikan modern belum sepenuhnya diimbangi dengan pemahaman mengenai etika komunikasi. Akibatnya, sebagian peserta didik cenderung mengekspresikan pendapat secara kurang proporsional sehingga berpotensi mengurangi penghormatan terhadap otoritas guru.

Situasi tersebut menempatkan guru pada posisi yang menuntut keseimbangan antara memberikan ruang partisipasi kepada peserta didik dan menjaga keteraturan proses pembelajaran. Guru dituntut untuk tetap mendorong keaktifan siswa dalam menyampaikan pendapat, namun pada saat yang sama harus memastikan bahwa kebebasan tersebut dilaksanakan sesuai dengan norma kesopanan dan tata krama yang berlaku di lingkungan sekolah. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi guru

dalam menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif.

Selain itu, perkembangan teknologi dan media sosial turut mempengaruhi pola perilaku peserta didik (Ai Siti Gina Nur Agnia, Yayang Furi Furnamasari 2021). Akses yang luas terhadap berbagai platform digital, khususnya media sosial yang populer di kalangan remaja seperti Tik-Tok, turut membentuk pola komunikasi dan perilaku siswa. Banyak konten digital yang menampilkan penggunaan bahasa informal, candaan berlebihan, hingga ungkapan-ungkapan yang kurang pantas untuk diterapkan dalam lingkungan pendidikan. Tanpa adanya pendampingan dan penyaringan yang memadai, paparan terhadap konten semacam ini dapat memengaruhi cara peserta didik berinteraksi.

Pada jenjang sekolah menengah pertama, peserta didik masih berada dalam tahap perkembangan pencarian jati diri sehingga cenderung mudah meniru perilaku yang dianggap menarik atau sesuai dengan tren

di lingkungan sekitarnya. Kondisi ini membentuk kebiasaan komunikasi yang lebih bebas dan informal, yang terkadang terbawa ke lingkungan sekolah. Dalam beberapa kasus, hal ini terlihat dari penggunaan bahasa yang kurang sopan, sikap acuh terhadap arahan guru, serta menurunnya sensitivitas peserta didik terhadap norma-norma kesopanan di lingkungan pendidikan.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat dipahami bahwa dilema yang dihadapi guru di SMP 1 Ulujami tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan dalam memberikan tindakan disipliner, tetapi juga dipengaruhi oleh perubahan karakter dan perilaku peserta didik pada era modern. Guru dituntut untuk mampu menyeimbangkan ketegasan dalam menegakkan aturan dengan pendekatan yang bijaksana agar pembinaan disiplin tetap berjalan efektif tanpa mengabaikan hak-hak peserta didik. Temuan ini menunjukkan bahwa penegakan disiplin di sekolah saat ini

membutuhkan strategi yang lebih adaptif, humanis, dan tetap berlandaskan pada nilai-nilai profesionalisme guru.

B. IMPLEMENTASI KODE ETIK GURU DALAM PENANGANAN DISIPLIN

Pengambilan keputusan dalam penanganan disiplin siswa di SMP 1 Ulujami merupakan bagian penting dari tugas guru yang harus dilakukan secara hati-hati dan bertanggung jawab. Keputusan yang diambil bukan sekadar memberi hukuman, tetapi merupakan proses memilih tindakan terbaik dari beberapa pilihan yang ada dengan mempertimbangkan kondisi siswa. Dalam hal ini, guru tidak boleh bertindak secara spontan atau emosional, melainkan harus melalui proses berpikir yang matang agar keputusan yang diambil benar-benar bersifat mendidik dan tidak merugikan siswa.

Di SMP 1 Ulujami, setiap keputusan dalam menangani pelanggaran disiplin harus berlandaskan pada kode etik

guru. Kode etik ini menjadi pedoman agar guru dapat bertindak secara adil, bijaksana, dan profesional. Artinya, ketika siswa melakukan pelanggaran, guru tidak langsung memberikan sanksi tanpa memahami latar belakangnya, tetapi berusaha melihat masalah secara menyeluruh. Hal ini penting agar penanganan disiplin tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada pembinaan karakter dan perbaikan perilaku siswa. (Syamsiyah,2025)

Implementasi kode etik dalam penanganan disiplin SMP 1 Ulujami dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, guru mengidentifikasi pelanggaran yang dilakukan siswa, seperti datang terlambat, tidak mengerjakan tugas, atau melanggar aturan sekolah. Kedua, guru menganalisis penyebab pelanggaran tersebut dengan menggali informasi dari siswa maupun pihak lain yang terkait. Ketiga, guru melakukan konsultasi dengan wali kelas, guru bimbingan konseling, atau kepala sekolah untuk

mendapatkan pertimbangan yang lebih objektif. Keempat, guru mempertimbangkan keputusan yang akan diambil dengan melihat dampaknya bagi perkembangan siswa, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kelima, guru mengambil keputusan yang adil, tidak diskriminatif, serta tetap menjunjung tinggi hak dan masa depan siswa. Keenam, guru melakukan evaluasi terhadap tindakan yang telah diberikan untuk melihat efektivitasnya dalam memperbaiki perilaku siswa.

Sebagai contoh, ketika seorang siswa SMP 1 Ulujami kedapatan membawa rokok ke sekolah, guru tidak langsung memberikan hukuman berat. Guru terlebih dahulu mencari tahu penyebabnya, misalnya karena pengaruh teman atau lingkungan. Setelah itu, guru bekerja sama dengan orang tua dan guru bimbingan konseling untuk memberikan pembinaan. Sanksi tetap diberikan, tetapi bersifat mendidik dan proporsional, sehingga tidak

berdampak negatif pada masa depan siswa.

Dengan demikian, implementasi kode etik guru dalam penanganan disiplin siswa SMP 1 Ulujami menekankan bahwa setiap keputusan harus didasarkan pada nilai keadilan, kepedulian, dan tanggung jawab. Guru tidak hanya berperan sebagai pemberi sanksi, tetapi juga sebagai pembimbing yang membantu siswa memperbaiki diri, sehingga disiplin yang diterapkan dapat membentuk karakter siswa menjadi lebih baik.

C. PENGARUH PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA TERHADAP OTORITAS GURU

Dalam pembahasan ini, sebenarnya terlihat jelas adanya pengaruh perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap otoritas guru, meskipun tidak disebutkan secara langsung. Hal ini dapat dilihat dari cara guru dalam mengambil keputusan yang tidak lagi bersifat bebas atau sewenang-wenang, tetapi harus melalui proses yang mempertimbangkan hak-hak

siswa. Guru tidak langsung memberikan hukuman ketika terjadi pelanggaran, melainkan terlebih dahulu memahami masalah, mencari penyebabnya, serta melihat kondisi siswa secara menyeluruh. Ini menunjukkan bahwa siswa dipandang sebagai individu yang memiliki hak untuk diperlakukan secara adil dan manusiawi, bukan hanya sebagai objek yang harus menerima hukuman.

Selain itu, dalam proses pengambilan keputusan, guru juga melibatkan pertimbangan dari berbagai pihak seperti wali kelas, guru bimbingan konseling, dan orang tua. Hal ini menandakan bahwa keputusan yang diambil tidak bersifat sepihak, tetapi memperhatikan kepentingan terbaik bagi siswa. Dalam perspektif HAM, setiap anak memiliki hak untuk dilindungi, dibimbing, dan diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Oleh karena itu, keputusan yang diambil guru harus mengarah pada pembinaan, bukan sekadar pemberian sanksi. Pengaruh

HAM juga terlihat dari penekanan pada nilai keadilan, tidak diskriminatif, serta menjaga masa depan siswa. Guru tidak boleh membedakan perlakuan terhadap siswa berdasarkan latar belakang tertentu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya dalam jangka panjang. Ini berarti otoritas guru tidak lagi bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh prinsip-prinsip kemanusiaan dan aturan yang melindungi hak siswa. Guru tetap memiliki kewenangan untuk menegakkan disiplin, tetapi harus dilakukan dengan cara yang bijaksana, proporsional, dan tidak merugikan perkembangan siswa (Febrinke and Zatadini 2026).

Kemudian dalam contoh kasus yang diberikan, terlihat bahwa guru tidak langsung memberikan hukuman berat kepada siswa yang melanggar, tetapi melakukan pendekatan yang lebih mendidik, seperti pembinaan dan kerja sama dengan orang tua. Hal ini menunjukkan bahwa otoritas guru telah mengalami perubahan

dari yang sebelumnya cenderung menekankan hukuman, menjadi lebih mengutamakan pendekatan edukatif dan pembinaan karakter. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip HAM yang menekankan perlindungan terhadap anak dari tindakan yang dapat merugikan fisik maupun psikologisnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perspektif HAM memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap otoritas guru dalam penanganan disiplin siswa. Otoritas guru tidak dihilangkan, tetapi diarahkan agar digunakan secara bertanggung jawab, adil, dan menghargai hak-hak siswa. Guru tidak hanya berperan sebagai penegak aturan, tetapi juga sebagai pembimbing yang membantu siswa berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Oleh karena itu, penerapan HAM dalam lingkungan pendidikan menjadikan proses penegakan disiplin lebih manusiawi, mendidik, dan berorientasi pada pembentukan karakter siswa.

D. Strategi Guru dalam

**Menegakkan Disiplin secara
Humanis**

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di SMP 1 Ulujami serta diperkuat oleh kajian literatur yang relevan, temuan menunjukkan bahwa penegakan disiplin yang efektif di era hak asasi manusia cenderung mengarah pada pendekatan humanis. Pendekatan ini tidak hanya menjadi alternatif, tetapi juga merupakan kebutuhan dalam merespons perubahan karakteristik peserta didik yang semakin kritis dan ekspresif. Hal ini sejalan dengan teori pendidikan humanistik yang dikemukakan oleh Carl Rogers, yang menekankan pentingnya penghargaan terhadap individu, empati, serta pengembangan kesadaran diri dalam proses pendidikan. Dalam konteks ini, disiplin tidak lagi dimaknai sebagai bentuk kontrol eksternal melalui hukuman, melainkan sebagai proses internalisasi nilai yang bertujuan membentuk tanggung jawab dan kesadaran

peserta didik (Chailani et al. 2024).

Hasil observasi menunjukkan bahwa guru di SMP 1 Ulujami secara aktif menerapkan pendekatan dialogis dalam menangani pelanggaran disiplin. Guru tidak langsung memberikan sanksi, tetapi terlebih dahulu mengajak peserta didik berdialog untuk menggali latar belakang perilaku yang muncul, baik yang berkaitan dengan faktor pribadi, lingkungan, maupun kondisi emosional. Pendekatan ini terbukti mampu mengurangi sikap defensif peserta didik serta membuka ruang refleksi diri. Selain itu, komunikasi yang bersifat persuasif dan tidak menghakimi mendorong peserta didik untuk lebih terbuka dalam menerima arahan, sehingga proses pembinaan menjadi lebih efektif dan berkelanjutan.

Di samping itu, penerapan aturan berbasis kesepakatan kelas (*class agreement*) menjadi strategi penting dalam membangun disiplin yang bersifat partisipatif. Berdasarkan temuan,

guru melibatkan peserta didik dalam merumuskan aturan kelas pada awal pembelajaran, termasuk konsekuensi yang akan diterima jika terjadi pelanggaran. Keterlibatan ini menumbuhkan rasa memiliki terhadap aturan, sehingga peserta didik tidak hanya mematuhi karena takut pada sanksi, tetapi karena memahami dan menyepakati nilai yang mendasarinya. Hal ini menunjukkan bahwa disiplin yang dibangun secara kolektif lebih efektif dalam menciptakan kepatuhan yang bersifat internal.

Dalam menangani pelanggaran disiplin, guru cenderung menghindari hukuman yang bersifat fisik maupun verbal, dan lebih mengedepankan konsekuensi yang bersifat edukatif. Misalnya, peserta didik yang melanggar aturan diberikan tugas refleksi, membuat pernyataan komitmen, atau melakukan kegiatan yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial. Strategi ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran moral dan kemampuan evaluasi diri, bukan

sekadar memberikan efek jera. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *restorative discipline* yang menekankan pemulihan hubungan dan perbaikan perilaku, sehingga peserta didik tidak merasa tertekan atau terstigma (Mabruroh, Nana Supriatna 2024)

Selain itu, keteladanan guru menjadi aspek yang sangat menentukan dalam keberhasilan penegakan disiplin secara humanis. Hasil observasi menunjukkan bahwa sikap guru yang konsisten, adil, dan menghargai peserta didik memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perilaku siswa. Peserta didik cenderung meniru pola perilaku yang ditunjukkan guru, sehingga nilai-nilai disiplin lebih mudah diinternalisasi melalui contoh nyata dibandingkan sekadar instruksi verbal. Dengan demikian, guru tidak hanya berfungsi sebagai pengontrol perilaku, tetapi juga sebagai model dalam pembentukan karakter.

Tidak kalah penting, kolaborasi antara guru, orang tua, dan pihak sekolah juga menjadi faktor pendukung utama. Dalam beberapa kasus, perilaku peserta didik dipengaruhi oleh kondisi keluarga atau lingkungan sosial di luar sekolah. Oleh karena itu, komunikasi yang intensif antara guru dan orang tua diperlukan untuk menyamakan persepsi serta menentukan strategi pembinaan yang tepat. Sinergi ini memungkinkan penanganan masalah disiplin dilakukan secara lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa strategi penegakan disiplin secara humanis yang diterapkan di SMP 1 Ulujami mencakup pendekatan dialogis, keterlibatan peserta didik dalam penyusunan aturan, pemberian konsekuensi edukatif, keteladanan guru, serta kolaborasi dengan orang tua. Strategi ini tidak hanya efektif dalam menjaga ketertiban pembelajaran, tetapi juga berperan penting dalam membentuk karakter peserta

didik yang lebih sadar, bertanggung jawab, dan beretika. Pendekatan ini sekaligus menjadi bentuk adaptasi terhadap tuntutan pendidikan di era hak asasi manusia yang menekankan keseimbangan antara disiplin dan penghormatan terhadap hak individu.

D. KESIMPULAN

Penegakan disiplin di lingkungan sekolah, khususnya di SMP 1 Ulujami, merupakan proses yang tidak sederhana dan penuh tantangan. Disiplin tidak hanya dimaknai sebagai kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga sebagai upaya membentuk karakter siswa agar memiliki tanggung jawab, sikap tertib, dan kesadaran dalam berperilaku. Dalam praktiknya, guru memiliki peran penting dalam menjaga keteraturan pembelajaran, namun juga dihadapkan pada berbagai dilema, terutama ketika harus menyeimbangkan antara ketegasan dalam menegakkan aturan dan kekhawatiran akan pelanggaran terhadap hak siswa. Perubahan perilaku siswa di era modern, yang dipengaruhi oleh

perkembangan teknologi, media sosial, serta pola komunikasi yang lebih bebas, semakin menambah kompleksitas tantangan yang dihadapi guru. Dalam kondisi tersebut, guru dituntut untuk tidak hanya mengandalkan pendekatan hukuman, tetapi juga menggunakan strategi yang lebih bijaksana dan humanis. Implementasi kode etik guru menjadi dasar penting dalam pengambilan keputusan, sehingga setiap tindakan yang diambil tidak bersifat emosional, melainkan melalui pertimbangan yang matang, adil, dan bertanggung jawab. Selain itu, perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) juga memberikan pengaruh terhadap cara guru menjalankan otoritasnya, di mana guru tidak lagi bertindak secara sewenang-wenang, tetapi harus menghormati hak-hak siswa serta mengutamakan pendekatan yang mendidik.

Oleh karena itu, strategi penegakan disiplin yang efektif saat ini adalah strategi yang mengedepankan pendekatan humanis, seperti komunikasi dialogis, keterlibatan siswa dalam membuat aturan, pemberian

konsekuensi yang bersifat edukatif, keteladanan guru, serta kerja sama dengan orang tua. Pendekatan ini terbukti mampu menciptakan suasana pembelajaran yang lebih kondusif sekaligus membantu siswa dalam mengembangkan kesadaran diri dan tanggung jawab. Dengan demikian, penegakan disiplin tidak lagi hanya bertujuan untuk mengontrol perilaku siswa, tetapi juga menjadi sarana penting dalam membentuk karakter siswa yang berakhlak, mandiri, dan mampu berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di lingkungan sekolah.

SARAN

Saran disusun berdasarkan temuan penelitian yang telah dibahas. Saran dapat mengacu pada tindakan praktis, pengembangan teori baru, dan/atau penelitian lanjutan.

DAFTAR RUJUKAN

- Addysa, Zalfa Violina, Lutfi Fahrul Rizal, Taufiq Alamsyah, and Info Artikel. 2024. "ANALISIS PELANGGARAN HAM OLEH GURU DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH." *AL-Mawarid: Jurnal Syari'ah dan Hukum* 6.
- Ahmad Zaki Ilman Nasution, Firman

- Firman, Nurfarhanah. 2025. "BUDAYA SEKOLAH DALAM PENGUATAN KARAKTER DISIPLIN SISWA: KAJIAN SISTEMATIS TENTANG PENDEKATAN DAN IMPLEMENTASINYA DI SEKOLAH Ahmad." *Journal Binagogik* 12(2): 151–60.
- Ai Siti Gina Nur Agnia, Yayang Furi Furnamasari, Dinie Anggraeni Dewi. 2021. "Pengaruh Kemajuan Teknologi Terhadap Pembentukan Karakter Siswa." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5: 1–5.
- Chailani, Muchammad Iqbal, Abdul Wahab Fahrub, Luk Luki, Fitri Rohmatilah, Muhammad Iqbal Chailani, Abdul Wahab Fahrub, Luk Luki, and Fitri Rohmatilah. 2024. "Teori Belajar Humanistik Dan Implikasinya Dalam Pembelajaran PAI Humanistic Learning Theory and Its Implications in Learning Islamic Education." *Jurnal Pendidikan* 33(2): 583–94.
- Febrinke, Yoan, and Nabila Zatadini. 2026. "Tinjauan Yuridis Terhadap Praktik Kekerasan Guru Dalam Perspektif Hak Asasi Anak Di Sekolah." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*: 6251–62.
- Mabruroh, Nana Supriatna, Aceng Hasani. 2024. "RESTITUSI DALAM MENANAMKAN DISIPLIN POSITIF PADA MURID Mabruroh1,." *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 09.
- Nurfaijan, Haifaturrahmah, Sari nursina. 2025. "Peran Guru Dalam Menanamkan Nilai Karakter Peserta Didik Di Sekolah Dasar." *Jurnal Pesona Indonesia* 2(14): 86–93.
- Salam, Hidayat. 2026. "Kriminalisasi Guru Honorer Jambi Dan Urgensi Reformasi Kultural Polri." *Kompas.id*.
- Samuel Mamonto, Darto Wahidin, Itsna Noor Laila, I Putu Dicky Merta Pratama, Ika Agustin Adityawati Achmad Tavip Junaedi, M Sahrawi Saimima, Nur Syafi'ah Khotim, Jihad Achmad Gojali, Sudarno, Nicholas Renaldo, and Diterbitkan. 2023. *Disiplin Dalam Pendidikan*. Malang: PT. Literasi Nusantara.
- Setianingsih, Leni. 2024. "TANGGUNG JAWAB GURU DALAM KEPERIBADIAN DAN PEMBELAJARAN." *Tematik: Jurnal Pendidikan Dasar Islam* 2(2): 25–31.
- Simamora, Della Pebriani, Desi Marlina Sidabutar, Edoward Fran Silalahi, Kristiani Meliala, Ramona Febiola Simorangkir, Sinta Uli Nainggolan, Tiur Intan, et al. 2025. "Kajian Tentang Kode Etik Guru Terkait Penghormatan Terhadap Hak Asasi Manusia Menghormati Hak Asasi Manusia." *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora* 4.